

Kepedulian Perusahaan Terhadap Tujuan SDGs 14 (*Life Below Water*): Bukti Empiris dan Implikasinya Bagi Kebijakan Kelautan Nasional

Analysis of Corporate Concerns Towards SDGS Goal 14: Implications for National Marine Policies

*Dining Nika Alina¹, Ahmad Hambali², Umar Abdurrahman¹, Ismail Maqbul¹, Ernawati³, dan Neng Tanty Sofyana¹

¹Departemen Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran
Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, Indonesia

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia
Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16425, Indonesia

³Departemen Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran
Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, Indonesia

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 23 Mei 2025
Perbaikan naskah: 17 Maret 2026
Disetujui terbit : 15 April 2026

*Korespondensi penulis:
Email: nika.alina@unpad.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v16i1.15895>



ABSTRAK

Peran perusahaan semakin krusial dalam pencapaian SDGs 14 (*Life Below Water*) karena aktivitas bisnis dapat mempercepat degradasi ekosistem laut maupun mendorong praktik keberlanjutan. Namun, bukti empiris tentang sejauh mana perusahaan berkomitmen pada SDGs 14 dan faktor internal yang memengaruhinya masih terbatas, khususnya di negara berkembang dan konteks Indonesia, karena riset terdahulu lebih banyak menyoroti SDGs secara umum atau isu lingkungan yang tidak spesifik pada ekosistem laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016–2023. Kepedulian terhadap SDGs 14 diukur menggunakan variabel dummy SDGs14 yakni 1 jika perusahaan memuat deklarasi, strategi, atau aksi eksplisit terkait SDG 14; 0 jika tidak. Analisis utama menggunakan regresi logistik (logit). Studi ini menemukan bahwa komitmen perusahaan terhadap SDGs 14 masih relatif terbatas dan cenderung bervariasi antar sektor. Temuan lainnya menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar, memiliki skor ESG (*Environmental, Social, and Governance*) tinggi, serta berasal dari sektor berdampak tinggi terhadap laut seperti energi dan infrastruktur, cenderung lebih peduli terhadap isu keberlanjutan laut. Sebaliknya, perusahaan dengan *leverage* tinggi dan usia lebih tua menunjukkan kecenderungan sebaliknya. Implikasi praktis dari temuan ini menekankan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih berbasis sektor, pemberian insentif terhadap praktik ESG yang baik, serta intervensi pemerintah untuk mendorong keterlibatan korporasi secara lebih merata dalam pelestarian ekosistem laut nasional.

Kata Kunci: SDGs 14; konservasi laut; kebijakan kelautan; sektor swasta; pemerintah

ABSTRACT

The role of corporations has become increasingly critical in achieving SDG 14 (*Life Below Water*) because business activities can both accelerate the degradation of marine ecosystems and promote sustainability practices. However, empirical evidence on the extent of corporate commitment to SDG 14 and the internal factors influencing it remains limited, particularly in developing countries and in the Indonesian context, since prior studies have tended to focus on the SDGs in general or on environmental issues that are not specific to marine ecosystems. This study aims to fill this gap by examining firms listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) over the 2016–2023 period. Concern for SDG 14 is measured using an SDGs14 dummy variable coded 1 if the firm reports explicit declarations, strategies, or actions related to SDG 14, and 0 otherwise. The main analysis employs logistic regression (logit). The study finds that corporate commitment to SDG 14 remains relatively limited and varies across sectors. The results further show that larger companies, those with high ESG (*Environmental, Social, and Governance*) scores, and those from sectors with high impacts on the ocean such as energy and infrastructure, tend to be more concerned about marine sustainability issues. In contrast, companies with high leverage and older age show the opposite tendency. The practical implications of these findings emphasize the need for a more sector-based policy approach, incentives for good ESG practices, and government intervention to encourage more equitable corporate involvement in preserving national marine ecosystems.

Keywords: SDGs 14; marine conservation; marine policy; private sector; government.

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki lebih dari dua pertiga wilayahnya berupa laut dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi (Soemarmi & Diamantina, 2019). Kondisi ini menjadikan laut sebagai ruang hidup sekaligus aset strategis nasional, tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan dan

mata pencaharian masyarakat pesisir, tetapi juga menopang ketahanan pangan, konektivitas wilayah melalui transportasi laut, serta sebagai penggerak utama sektor-sektor ekonomi seperti perikanan, pariwisata bahari, pelayaran, dan energi kelautan (Marwa *et al.*, 2024; Riesnandar & Nuhartonosuro, 2025). Oleh karena itu, keberlanjutan ekosistem

laut merupakan fondasi penting bagi kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi nasional (Marwa *et al.*, 2024).

Dalam konteks pengelolaan kelautan saat ini, ekosistem laut Indonesia tengah menghadapi ancaman serius akibat tekanan aktivitas manusia yang bersifat destruktif dan tidak berkelanjutan yang semakin menggerus daya dukung ekosistem laut. Pencemaran laut, eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya perikanan, perubahan iklim, serta alih fungsi kawasan pesisir telah menyebabkan degradasi ekosistem laut yang signifikan (Jubaedah & Anas, 2019). Tekanan tersebut tercermin secara kuantitatif melalui data dari Ocean Health Index (OHI) tahun 2024 menunjukkan bahwa skor Indonesia turun dari 66 pada tahun 2023 menjadi 62, menempatkannya ke peringkat 189 dari 220 wilayah. Skor ini jauh di bawah rata-rata global, yaitu sebesar 69 (*Ocean Health Index*, 2024). Penurunan tersebut tidak hanya menggambarkan kondisi nasional, tetapi juga merefleksikan tantangan global dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Di Vaio *et al.*, 2024; Hambali & Adhariani, 2024).

Sebagai respons atas krisis tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa menginisiasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), termasuk SDGs 14: *Life Below Water*, yang secara spesifik menekankan pentingnya konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut dan pesisir (PBB, 2015). Tujuan ini mencakup pengurangan polusi laut, pengelolaan perikanan secara berkelanjutan, serta perlindungan habitat pesisir (Awuah *et al.*, 2024; Guillamón *et al.*, 2025). Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia telah mengadopsi sejumlah kebijakan pendukung, seperti Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menetapkan kewajiban bagi pihak-pihak yang memanfaatkan wilayah pesisir, termasuk korporasi, untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Selain itu, SDGs 14 telah dimasukkan sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 (Wiryanto *et al.*, 2025). Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, terutama sektor bisnis yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pemanfaatan dan tekanan terhadap sumber daya laut.

Meskipun kerangka kebijakan dan regulasi telah ditetapkan di tingkat global dan nasional, pencapaian target SDGs 14 secara efektif tidak dapat bergantung pada peran pemerintah semata,

sehingga pelibatan sektor bisnis menjadi sangat penting (Awuah *et al.*, 2024; Galeazzo *et al.*, 2024). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak aktivitas industri, seperti eksplorasi energi, pembangunan infrastruktur pesisir, serta kegiatan produksi dan distribusi yang menghasilkan limbah, turut memberikan tekanan terhadap kualitas ekosistem laut (Di Vaio *et al.*, 2024; Hambali & Adhariani, 2024). Studi Zulbainarni *et al.* (2020) menunjukkan bahwa ketidaksiapan pelaku usaha dalam mengadopsi praktik perikanan berkelanjutan menjadi salah satu hambatan utama dalam mencapai target SDG 14. Meskipun studi tersebut tidak secara khusus berfokus pada korporasi, temuan itu mengindikasikan bahwa aktor ekonomi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya kelautan masih menghadapi tantangan dalam mendukung agenda keberlanjutan. Oleh karena itu, peran serta dunia usaha tidak cukup hanya melalui kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga harus diwujudkan dalam komitmen aktif untuk menerapkan praktik berkelanjutan yang dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan laut (Hambali, 2024; Nicolò *et al.*, 2024; Urbietta, 2024).

Sebagai bentuk dorongan kepada dunia usaha agar lebih akuntabel terhadap isu keberlanjutan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 Regulasi ini mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keberlanjutan yang mencerminkan komitmen dan kontribusi mereka terhadap aspek *Environmental, Social, Governance (ESG)*. Dalam konteks lingkungan, komitmen tersebut dapat mencakup upaya perlindungan ekosistem laut dan pesisir, termasuk pelestarian laut melalui pengendalian limbah dan polusi, pengurangan sampah plastik, rehabilitasi ekosistem pesisir, serta penguatan praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab terhadap sumber daya kelautan. Gutierrez-Ponce *et al.* (2023) menegaskan bahwa pelaporan keberlanjutan yang efektif merupakan salah satu mekanisme kunci dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan terhadap SDGs. Dengan kerangka ini, diharapkan perusahaan dapat secara sistematis mengintegrasikan tujuan SDGs 14 ke dalam strategi bisnis dan praktik operasionalnya. Hal ini sejalan dengan temuan Erin dan Olojede (2024) dan Awuah *et al.* (2024) bahwa *corporate SDG reporting* merupakan mekanisme utama bagi perusahaan untuk menunjukkan kontribusi substantif terhadap Agenda 2030, yaitu kerangka pembangunan global yang diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 untuk

mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui 17 tujuan dan 169 target yang terintegrasi hingga tahun 2030. Dalam kerangka ini, sektor swasta dipandang sebagai aktor penting karena pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tidak hanya bergantung pada kebijakan negara, tetapi juga pada bagaimana perusahaan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi, operasional, dan pelaporannya (United Nations, 2015).

Meskipun berbagai kebijakan global dan nasional telah mendorong agenda pelestarian laut, implementasinya masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam keterlibatan sektor swasta (Auwah *et al.*, 2024; Wiryanto *et al.*, 2025). Dalam penelitian ini, kepedulian perusahaan terhadap SDGs 14 tidak dimaknai secara umum sebagai sikap normatif atau dukungan simbolik, melainkan sebagai adanya perhatian yang tercermin dalam pengungkapan komitmen, strategi, atau tindakan perusahaan yang relevan dengan perlindungan ekosistem laut dan pesisir. Bentuk kepedulian tersebut dapat berupa pengelolaan limbah agar tidak mencemari perairan, pengurangan penggunaan plastik, pengendalian polusi dari proses produksi dan distribusi, rehabilitasi ekosistem pesisir seperti mangrove, efisiensi penggunaan sumber daya yang berdampak pada kualitas perairan, hingga integrasi isu kelautan dalam kebijakan keberlanjutan dan pelaporan perusahaan (Hambali, 2024; Hambali & Adhariani, 2024; Urbietta, 2024). Dengan demikian, kepedulian terhadap SDGs 14 dalam studi ini dipahami sebagai perhatian perusahaan yang terartikulasikan secara eksplisit dalam strategi, kebijakan, atau aksi yang berkaitan dengan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem laut.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa keterlibatan perusahaan dalam SDGs 14 masih belum terbangun secara konsisten. Studi Zulaika *et al.* (2024) menunjukkan bahwa kepedulian korporasi terhadap SDGs 14 masih bersifat sporadis dan belum diintegrasikan secara sistematis dalam strategi bisnis. Padahal, perusahaan memiliki potensi dan kapasitas yang besar dalam mendukung pelestarian laut melalui praktik bisnis berkelanjutan, investasi teknologi ramah lingkungan, serta transparansi pelaporan keberlanjutan (Aptasari *et al.*, 2024). Minimnya regulasi yang mengatur secara eksplisit peran perusahaan dalam mendukung SDGs 14 menyebabkan inisiatif mereka cenderung bergantung pada kesukarelaan dan tekanan reputasi. Hal ini berbeda dengan konteks yang diharapkan dalam pelaporan substantif yang menekankan akuntabilitas dan legitimasi, sebagaimana disoroti oleh Lodhia *et al.* (2023) dan diperkuat oleh Nicolo *et al.* (2024) yang menemukan bahwa kualitas SDG

disclosure lebih tinggi pada perusahaan dengan kinerja keberlanjutan yang nyata.

Meskipun literatur mengenai SDGs dan pelaporan keberlanjutan terus berkembang, masih terdapat ruang kosong yang penting. Pertama, penelitian terdahulu umumnya membahas SDGs secara agregat atau berfokus pada isu lingkungan secara umum, sehingga masih sedikit studi yang secara khusus menelaah SDGs 14 pada level perusahaan (Auwah *et al.*, 2024; Di Vaio *et al.*, 2024). Kedua, bukti empiris dalam konteks Indonesia masih terbatas, padahal Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kepentingan strategis yang sangat besar terhadap keberlanjutan laut (Marwa *et al.*, 2024; Soemarmi & Diamantina, 2019). Ketiga, kajian yang secara kuantitatif menguji faktor-faktor penentu kepedulian perusahaan terhadap SDGs 14 pada tingkat perusahaan per tahun (*firm-year*) masih sangat terbatas (Gutiérrez-Ponce & Wibowo, 2023; Zulaika *et al.*, 2024).

Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan kepedulian terhadap SDGs 14 selama periode 2016–2023. Penelitian ini juga mengeksplorasi faktor-faktor internal perusahaan yang memengaruhi kepedulian tersebut, serta menilai efektivitas kerangka kebijakan yang ada. Dalam penelitian ini, kepedulian terhadap SDGs 14 dimaknai sebagai adanya pengungkapan berupa deklarasi, strategi, kebijakan, atau aksi perusahaan yang secara eksplisit berkaitan dengan perlindungan ekosistem laut dan pesisir, seperti pengendalian limbah dan polusi, pengurangan sampah plastik, rehabilitasi ekosistem pesisir, efisiensi penggunaan sumber daya yang berdampak pada kualitas perairan, serta pengintegrasian isu kelautan ke dalam kebijakan keberlanjutan dan pelaporan perusahaan (Hambali, 2024; Hambali & Adhariani, 2024; Lodhia *et al.*, 2023; Urbietta, 2024). Hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam perumusan kebijakan kelautan nasional yang tidak hanya mengandalkan pendekatan regulatif, tetapi juga menyertakan instrumen insentif dan kolaborasi lintas sektor. Temuan ini juga diharapkan dapat digunakan untuk memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi kinerja sektor usaha dalam mendukung pencapaian SDGs 14 di Indonesia (Gutiérrez-Ponce & Wibowo, 2023; Wiryanto *et al.*, 2025; Zulfainarni *et al.*, 2020).

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016–2023, dengan sampel dipilih

melalui *purposive sampling* berdasarkan ketersediaan laporan keuangan dan laporan keberlanjutan. Data mengenai komitmen terhadap SDGs 14 diperoleh melalui analisis konten terhadap laporan-laporan tersebut, menggunakan kata kunci spesifik seperti “ekosistem laut”, “polusi laut”, dan “keberlanjutan kelautan” untuk mengidentifikasi deklarasi, strategi, atau aksi nyata perusahaan. Kepedulian perusahaan terhadap SDGs 14 diukur secara *biner (dummy)*, dengan nilai 1 bagi perusahaan yang menunjukkan kepedulian dan 0 bagi yang tidak. Terdapat sejumlah faktor yang digunakan sebagai variabel independen yang dianalisis dengan metode pengukuran tertentu sesuai dalam Tabel 1. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memetakan distribusi kepedulian antar tahun dan sektor, sementara untuk menguji pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap probabilitas perusahaan yang menunjukkan kepedulian terhadap SDGs 14 digunakan model persamaan regresi logistik sebagai berikut:

$$SDGs14_{it} = \beta_0 + \beta_1 ESG_{it} + \beta_2 SIZE_{it} + \beta_3 MKTCAP_{it} + \beta_4 ROA_{it} + \beta_5 RISK_{it} + \beta_6 AGE_{it} + \beta_7 SECTOR_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots(1)$$

Model regresi logistik (*logit*) digunakan dalam penelitian ini karena variabel dependen, yaitu kepedulian perusahaan terhadap SDGs 14, diukur dalam bentuk biner, dengan nilai 1 untuk perusahaan yang menunjukkan adanya deklarasi, strategi, atau aksi eksplisit terkait SDGs 14 dan nilai 0 untuk perusahaan yang tidak menunjukkannya. Dalam kondisi demikian, penggunaan regresi logistik lebih tepat dibandingkan regresi linear karena mampu mengestimasi probabilitas kemunculan

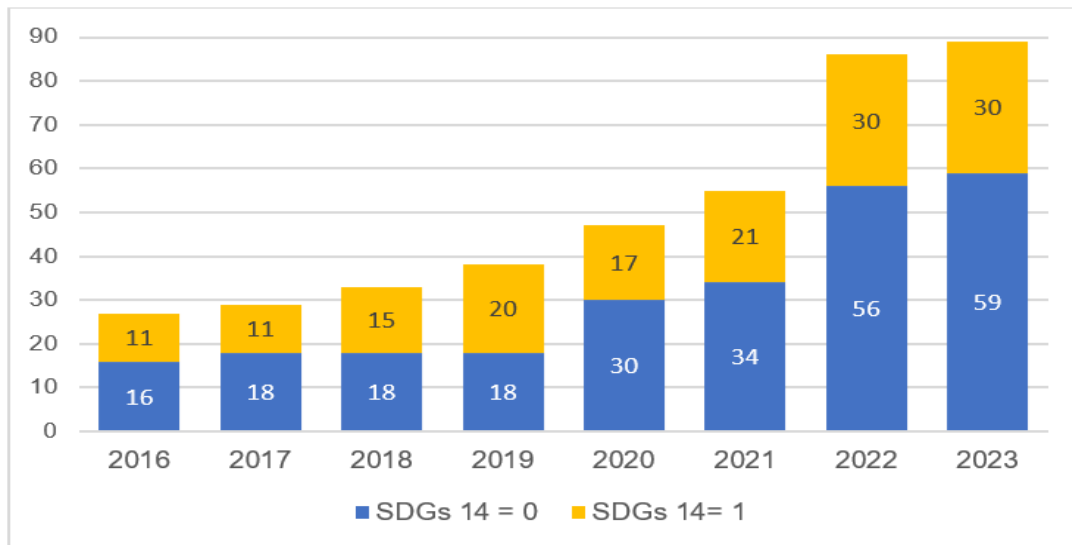
suatu peristiwa biner secara lebih sesuai dengan karakteristik data serta menghindari prediksi di luar rentang 0 hingga 1 (Hosmer Jr et al., 2013; Menard, 2002). Model regresi logistik (*logit*) diestimasi menggunakan metode *maximum likelihood* sebagaimana dirumuskan dalam literatur standar regresi logistik (Hosmer Jr et al., 2013; Menard, 2002). Untuk memastikan kelayakan dan ketepatan inferensi, penelitian ini mengevaluasi *overall model fit* melalui *Likelihood Ratio (LR) test* dan *pseudo-R²*, serta menguji *goodness-of-fit* menggunakan uji Hosmer–Lemeshow (Hosmer & Lemeshow, 1980). Potensi multikolinearitas antar variabel independen diperiksa melalui korelasi Pearson dan *Variance Inflation Factor (VIF)* (O’Brien, 2007). Mengingat data merupakan observasi berulang pada perusahaan yang sama selama periode 2016–2023, *standar error* dihitung secara *robust* dan di-*cluster* pada tingkat perusahaan untuk mengakomodasi heteroskedastisitas dan ketergantungan intra-perusahaan dari waktu ke waktu (*serial correlation*) (Cameron & Miller, 2015).

TREN KEPEDULIAN PERUSAHAAN TERHADAP SDGS 14

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel, penelitian ini mencakup 404 observasi perusahaan selama periode 2016 hingga 2023. Jumlah ini merepresentasikan unit analisis yang memenuhi kriteria kelengkapan laporan dan relevansi terhadap pengujian kepedulian terhadap SDGs 14. Analisis deskriptif terhadap data ini menunjukkan adanya dinamika tren kepedulian perusahaan dari waktu ke waktu selama periode penelitian (2016-2023). Gambar 1 menyajikan tren kepedulian perusahaan di Indonesia.

Tabel 1. Definisi dan Pengukuran Variabel.

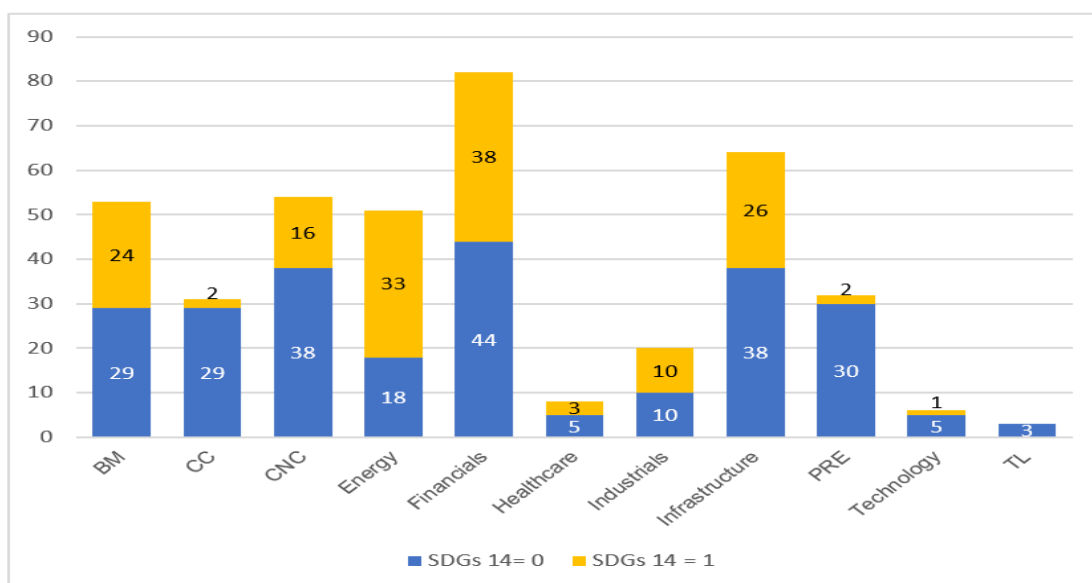
Variabel	Definisi	Pengukuran
<i>SDGs14</i>	Kepedulian perusahaan terhadap SDGs 14 yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan.	<i>Dummy</i> : 1 = ada deklarasi/strategi/aksi eksplisit terkait SDG 14; 0 = tidak ada
<i>ESG</i>	Kinerja keberlanjutan atau ESG perusahaan	Kinerja keberlanjutan perusahaan yang dinilai 0 hingga 100 menggunakan indeks dari database Thomson Reuters Eikon
<i>SIZE</i>	Ukuran perusahaan	Logaritma natural dari total aset perusahaan
<i>MKTCAP</i>	Kapitalisasi pasar	Logaritma natural dari nilai kapitalisasi saham perusahaan di akhir tahun laporan
<i>ROA</i>	Profitabilitas	<i>Return on Assets</i> = Laba Bersih / Total Aset
<i>RISK</i>	Risiko perusahaan	<i>Leverage</i> (Total Liabilitas / Total Aset)
<i>AGE</i>	Umur perusahaan	Tahun laporan dikurangi tahun pendirian perusahaan
<i>HIGH_IMPACT</i>	Sektor industri berdampak	<i>Dummy</i> : 1 = sektor relevan dengan kelautan/pesisir, yaitu sektor " <i>Energy</i> ", " <i>Basic Materials</i> ", " <i>Consumer Non-Cyclicals</i> ", " <i>Infrastructure</i> ", dan " <i>Transportation & Logistics</i> "; 0 = sektor lainnya



Gambar 1. Jumlah Perusahaan yang Peduli Terhadap SDGs 14 tahun 2016–2023.

Secara umum, data menunjukkan peningkatan jumlah perusahaan yang menunjukkan kepedulian terhadap SDGs 14 dari tahun ke tahun, meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2020. Penurunan ini sering dikaitkan dengan kondisi pandemi COVID-19, ketika perusahaan lebih memprioritaskan kelangsungan usaha dan manajemen krisis internal, seperti menjaga arus kas, penyesuaian operasional, stabilisasi rantai pasok, serta perlindungan kesehatan dan keselamatan pekerja, dibandingkan memperluas agenda keberlanjutan yang bersifat eksternal dan spesifik isu (Martín-Blanco *et al.*, 2022). Pada tahun 2016, terdapat 11 dari 27 perusahaan (40,74%) yang menunjukkan indikasi kepedulian terhadap SDG 14. Angka ini

meningkat menjadi 15 dari 33 perusahaan (45,45%) pada 2018, dan mencapai puncaknya pada tahun 2019 dengan 20 dari 38 perusahaan (52,63%). Meski demikian, secara proporsional terdapat penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2023, hanya 30 dari 89 perusahaan (33,71%) yang menunjukkan kepedulian eksplisit terhadap SDG 14. Fenomena ini mengindikasikan adanya fluktuasi perhatian korporasi yang mungkin dipengaruhi oleh dinamika regulasi, tekanan pasar, atau prioritas strategis masing-masing perusahaan, serta dipengaruhi oleh meningkatnya total perusahaan dalam sampel dari tahun ke tahun sehingga porsi perusahaan yang mengungkap SDG 14 menjadi lebih kecil secara relatif (Galeazzo *et al.*, 2024; Guillamón *et al.*, 2025).



Gambar 2. Jumlah Perusahaan yang Peduli Terhadap SDGs14 Berdasarkan Sektor.

(BM = Basic Materials; CC = Consumer Cyclical; CNC = Consumer Non-Cyclicals; PRE = Property and Real Estate; TL = Transportation & Logistics)

Dilihat dari klasifikasi sektoral, sebagaimana terlihat dalam Gambar 2, terdapat variasi signifikan dalam tingkat kepedulian antar sektor terhadap SDGs 14. Sektor “Energy” menempati posisi tertinggi dalam hal kepedulian, dengan 33 dari 51 perusahaan (64,71%) menunjukkan keterlibatan aktif dalam isu-isu SDGs 14. Hal ini dapat dimaklumi mengingat aktivitas industri energi, seperti eksplorasi, pengeboran lepas pantai, dan transportasi bahan bakar fosil, memiliki dampak langsung terhadap kualitas air laut, keberlanjutan habitat pesisir, dan risiko tumpahan minyak. Operasi di wilayah pesisir sering menyebabkan degradasi ekosistem mangrove, kerusakan terumbu karang, serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati laut (Arora et al., 2023; Davies & Smyth, 2025). Oleh karena itu, perusahaan di sektor energi kerap berada di bawah pengawasan lebih ketat dari publik dan regulator, mendorong mereka untuk mengadopsi praktik yang lebih bertanggung jawab secara lingkungan (Di Vaio et al., 2024; Hambali & Adhariani, 2024). Selain itu, meningkatnya tekanan global terhadap transisi energi bersih dan pengurangan emisi karbon juga turut mendorong perusahaan energi untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap tujuan keberlanjutan, termasuk SDGs 14 (Perevoznic & Dragomir, 2024).

Selanjutnya, sektor “Financials” menunjukkan tingkat kepedulian sebesar 38 dari 82 perusahaan (46,34%), yang mencerminkan peran penting sektor ini dalam memobilisasi pembiayaan berkelanjutan dan mendukung agenda pembangunan hijau (Taskin et al., 2024). Lembaga keuangan memiliki posisi strategis dalam mengarahkan arus modal ke aktivitas ekonomi yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan melalui instrumen seperti *green bonds*, *sustainability-linked loans*, dan portofolio investasi berbasis ESG. Seperti disampaikan oleh Lodhia et al. (2023), perusahaan-perusahaan di sektor jasa keuangan semakin terdorong untuk menunjukkan legitimasi keberlanjutan melalui integrasi isu SDGs dalam pelaporan dan pengambilan keputusan investasi mereka. Selain itu, pengaruh dari kerangka regulasi internasional serta ekspektasi investor global turut memperkuat komitmen sektor ini dalam mendukung tujuan SDGs, termasuk konservasi dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan (Nicolò et al., 2023). Sektor “Infrastructure” dan “Industrials” juga menunjukkan tingkat kepedulian yang cukup seimbang, masing-masing sebesar 40,63% dan 50%. Sektor “Basic Materials” mencatat 24 dari 53 perusahaan (45,28%) menunjukkan kepedulian, mencerminkan potensi risiko tinggi terhadap lingkungan dalam aktivitas produksi mereka.

Di sisi lain, sektor “Consumer Non-Cyclicals” dan “Property and Real Estate” memiliki tingkat kepedulian relatif rendah, dengan masing-masing hanya 16 dari 54 (29,63%) dan 2 dari 32 perusahaan (6,25%) menunjukkan komitmen terhadap SDG 14. Sektor “Transportation & Logistics” bahkan tidak menunjukkan kepedulian sama sekali, dengan seluruh tiga perusahaan dalam kategori ini tidak memiliki indikasi mendukung SDGs 14. Hasil ini menegaskan adanya kesenjangan sektoral dalam implementasi tujuan keberlanjutan laut yang perlu menjadi perhatian regulator dan pembuat kebijakan (Zulbainarni et al., 2020). Sektor “Technology” menunjukkan tingkat kepedulian yang sangat rendah dengan 1 dari 6 perusahaan yang menunjukkan kepedulian terhadap SDGs 14. Meskipun sektor transportasi laut merupakan bagian integral dari ekosistem laut, minimnya kepedulian sektor ini mungkin disebabkan oleh lemahnya pengawasan atau rendahnya tuntutan dari pasar dan regulasi terhadap praktik keberlanjutan mereka (Billedeau & Wilson, 2024; Zulbainarni et al., 2020). Kondisi ini menunjukkan perlunya peran aktif pemerintah dan regulator dalam mendorong tanggung jawab korporasi, terutama pada sektor-sektor yang memiliki dampak besar terhadap keberlanjutan laut namun belum secara optimal berkontribusi (Guillamón et al., 2025).

Dengan demikian, analisis tren ini menunjukkan bahwa walaupun ada peningkatan partisipasi dari beberapa sektor dan periode waktu tertentu, masih terdapat kesenjangan antar sektor dan fluktuasi tahunan yang perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan dan strategi nasional untuk memperkuat komitmen sektor swasta terhadap tujuan SDGs 14.

FAKTOR YANG MENDORONG KEPEDULIAN PERUSAHAAN TERHADAP SDGS 14

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong kepedulian perusahaan terhadap SDGs 14, kami menyajikan terlebih dahulu statistik deskriptif dari seluruh variabel yang digunakan dalam model. Tabel 2 memberikan ringkasan statistik deskriptif yang mencakup jumlah observasi, nilai rata-rata, deviasi standar, nilai minimum, dan maksimum dari masing-masing variabel penelitian.

Berdasarkan Tabel 2, statistik deskriptif dapat dikelompokkan menjadi variabel dependen dan variabel independen. Untuk variabel dependen, rata-rata *SDG14* sebesar 0,384, yang berarti sekitar 38,4% perusahaan dalam sampel menunjukkan kepedulian terhadap SDGs 14. Untuk variabel independen,

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel.

Variabel	Mean	Std. Dev.	Min	Max
<i>SDGs14</i>	0.384	0.487	0.00	1.000
<i>ESG</i>	49.72	19.84	8.16	88.83
<i>SIZE</i>	21.91	1.49	16.68	25.67
<i>MKTCAP</i>	21.61	1.56	16.28	26.47
<i>ROA</i>	0.059	0.060	-0.011	0.317
<i>RISK</i>	0.529	0.216	0.182	0.874
<i>AGE</i>	20.63	9.56	1.00	41.00
<i>HIGH_IMPACT</i>	0.557	0.497	0.00	1.00

skor ESG memiliki rata-rata skor 49,72 dengan standar deviasi 19,84, yang mengindikasikan adanya variasi besar dalam kinerja ESG antar perusahaan. Ukuran perusahaan (*SIZE*) dan kapitalisasi pasar (*MKTCAP*) masing-masing memiliki rata-rata log sebesar 21,91 dan 21,61, dengan kisaran nilai yang relatif sebanding. Variabel risiko perusahaan (*RISK*) dan profitabilitas (*ROA*) menunjukkan rata-rata masing-masing sebesar 0,529 dan 0,059, menandakan bahwa mayoritas perusahaan memiliki struktur modal yang relatif moderat dan tingkat profitabilitas yang rendah hingga sedang.

Sementara itu, variabel umur perusahaan (*AGE*) memiliki nilai rata-rata sebesar 20,63 tahun, dengan rentang usia dari perusahaan baru (1 tahun) hingga perusahaan yang sudah berdiri selama lebih dari empat dekade (41 tahun). Terakhir, variabel *HIGH_IMPACT* menunjukkan bahwa sekitar 55,7% perusahaan dalam sampel diklasifikasikan sebagai perusahaan dengan dampak tinggi terhadap lingkungan laut dan pesisir. Pengelompokan ini relevan secara konseptual karena sektor-sektor tersebut memiliki paparan aktivitas yang lebih langsung terhadap ekosistem laut, misalnya melalui operasi pesisir dan lepas pantai, produksi dan transportasi sumber daya, serta potensi kontribusi pada pencemaran dan degradasi habitat, sehingga keterkaitannya dengan agenda SDGs 14 menjadi lebih kuat dan lebih terlihat dalam pelaporan serta strategi korporasi (Arora *et al.*, 2023; Di Vaio *et al.*, 2024; Hambali & Adhariani, 2024). Dengan demikian, variabel *HIGH_IMPACT* tidak hanya menggambarkan proporsi sampel, tetapi juga merepresentasikan peran sektor industri sebagai kanal utama yang membedakan intensitas dampak dan, pada akhirnya, kecenderungan perusahaan untuk menunjukkan kepedulian terhadap SDGs 14 (Di Vaio *et al.*, 2024; Zulfainarni *et al.*, 2020). Informasi deskriptif ini memberikan indikasi awal tentang karakteristik umum perusahaan yang diteliti dan menjadi dasar penting dalam interpretasi hasil pengujian regresi logistik pada tahap selanjutnya.

Selanjutnya, dilakukan pengujian menggunakan korelasi Pearson dan uji multikolinearitas untuk memastikan tidak adanya masalah korelasi tinggi antar variabel independen. Hasil pengujian ini, sebagaimana terlihat pada Gambar 3, menunjukkan bahwa nilai VIF tertinggi adalah 3 (di bawah ambang 10). Dengan demikian, tidak terdapat indikasi multikolinearitas yang berarti sehingga estimasi koefisien dapat diinterpretasikan secara andal.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas.

Variable	VIF	1/VIF
<i>SIZE</i>	3.25	0.307908
<i>MARCAP</i>	2.89	0.345474
<i>ROA</i>	1.61	0.623022
<i>LEV</i>	1.38	0.725437
<i>ESG</i>	1.30	0.766361
<i>HIGH_IMPACT</i>	1.12	0.895675
<i>AGE</i>	1.05	0.952743
Mean VIF	1.80	

Tabel 4 menyajikan hasil pengujian regresi logistik terhadap variabel dependen SDGs 14. Berdasarkan hasil tersebut, model memiliki *goodness-of-fit* yang baik dengan nilai *chi-square* sebesar 277,35 ($p < 0,01$) dan nilai Pseudo R-squared sebesar 0,5155 yang mengindikasikan bahwa model dapat menjelaskan sekitar 51,6% variasi dalam kepedulian perusahaan terhadap SDGs 14.

Secara spesifik, variabel ESG berpengaruh signifikan terhadap kepedulian perusahaan dengan koefisien positif sebesar 0,1267 dan p -value $< 0,000$, mengindikasikan bahwa semakin tinggi skor ESG perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan menunjukkan kepedulian terhadap SDG 14. Ukuran perusahaan (*SIZE*) juga menunjukkan pengaruh positif yang signifikan dengan koefisien 0,4576 dan p -value 0,015, yang berarti perusahaan besar cenderung lebih sadar terhadap isu-isu kelautan (Hambali, 2024; Hambali & Adhariani, 2024).

Tabel 4. Hasil Regresi Logistik.

Variabel	Koefisien	Std. Error	z	P-value
<i>ESG</i>	0.1267	0.0143	8.87	0.000
<i>SIZE</i>	0.4576	0.2110	2.17	0.015
<i>MKTCAP</i>	0.2042	0.1598	1.28	0.1005
<i>ROA</i>	0.6405	3.8133	0.19	0.425
<i>RISK</i>	-1.2627	0.8911	-1.42	0.079
<i>AGE</i>	-0.0482	0.0181	-2.66	0.004
<i>HIGH_IMPACT</i>	0.6099	0.3480	1.75	0.040
Kontanta	-20.7229	3.8833	-5.34	0.000
Observasi		404		
LR chi2		277.35		
Prob > chi2		0.0000		
Pseudo R2		0.5155		

Variabel *HIGH_IMPACT* juga memiliki pengaruh positif yang signifikan secara statistik (koefisien 0,6099, p-value 0,04), yang mengindikasikan bahwa perusahaan yang beroperasi di sektor dengan dampak tinggi terhadap lingkungan laut memiliki kecenderungan lebih besar untuk menunjukkan kepedulian terhadap SDG 14.

Adapun variabel *MKTCAP* dan *ROA* tidak menunjukkan signifikansi statistik pada tingkat konvensional (p-value > 0,05), meskipun arah hubungannya sejalan dengan teori. Sementara itu, variabel *RISK* dan *AGE* memiliki koefisien negatif, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi risiko perusahaan dan semakin tua umur perusahaan, cenderung semakin rendah kemungkinannya untuk menunjukkan kepedulian terhadap SDGs 14. Kepedulian terhadap tujuan yang mendukung keberlanjutan lingkungan memerlukan keterlibatan aktif dan komitmen dari berbagai perusahaan lintas sektor. Namun, perilaku lingkungan perusahaan terlihat bervariasi sesuai dengan karakteristiknya, terutama ukuran, kepemilikan, dan usianya (Balasubramanian et al., 2021; Darnall et al., 2010).

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepedulian perusahaan terhadap SDGs 14 di Indonesia yang diungkapkan dalam laporan perusahaan masih terbatas dan tidak merata antar sektor. Temuan empiris memperlihatkan bahwa perusahaan dengan ukuran lebih besar, skor ESG yang lebih tinggi, dan karakteristik sektor yang berdampak tinggi terhadap lingkungan laut dan pesisir memiliki kecenderungan lebih besar untuk mengungkapkan kepedulian terhadap SDGs 14. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat risiko keuangan yang lebih tinggi dan perusahaan yang

lebih tua cenderung memiliki peluang lebih rendah untuk menunjukkan kepedulian terhadap SDGs 14.

Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki sumber daya, kapasitas pelaporan, dan visibilitas publik yang lebih tinggi, sehingga lebih terdorong untuk menunjukkan tanggung jawab keberlanjutan mereka melalui pengungkapan yang lebih luas (Hambali, 2024; Hambali & Adhariani, 2024). Kecenderungan yang sama pada perusahaan dengan skor ESG lebih tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan yang telah memiliki fondasi keberlanjutan yang lebih kuat umumnya lebih siap mengintegrasikan isu yang lebih spesifik, termasuk perlindungan ekosistem laut dan pesisir, ke dalam strategi dan pelaporannya (Lodhia et al., 2023; Nicolo et al., 2024). Sementara itu, perusahaan yang berada pada sektor berdampak tinggi terhadap laut dan pesisir menghadapi tekanan legitimasi, risiko lingkungan, dan sorotan pemangku kepentingan yang lebih besar, sehingga memiliki insentif lebih kuat untuk mengungkapkan kepedulian terhadap SDGs 14 (Di Vaio et al., 2024; Hambali & Adhariani, 2024; Zulfainarni et al., 2020). Sebaliknya, tekanan keuangan yang tinggi dapat membuat perusahaan lebih berfokus pada stabilitas jangka pendek daripada agenda keberlanjutan yang lebih spesifik, sedangkan perusahaan yang lebih tua cenderung memiliki rutinitas organisasi dan orientasi strategis yang lebih mapan sehingga relatif lebih lambat beradaptasi terhadap tuntutan baru, termasuk isu konservasi laut (Hambali, 2024; Urbietta, 2024; Galeazzo et al., 2024; Guillamón et al., 2025).

Temuan ini memberikan dasar penting bagi pembuat kebijakan untuk merancang intervensi yang lebih terarah dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik perusahaan dan peran sektor industri. Pendekatan berbasis sektor menjadi penting karena tekanan dan keterkaitan aktivitas bisnis terhadap

ekosistem laut berbeda antar industri, sehingga kebutuhan instrumen kebijakan juga tidak identik, terutama pada sektor berdampak tinggi yang berinteraksi lebih langsung dengan isu kelautan dan pesisir (Di Vaio *et al.*, 2024; Hambali & Adhariani, 2024). Selain itu, penguatan insentif dan standar ESG dapat difokuskan untuk memperluas partisipasi perusahaan di luar kelompok yang sudah relatif responsif, serta mendorong perusahaan berisiko tinggi dan perusahaan yang lebih matang agar lebih konsisten mengintegrasikan SDGs 14 dalam strategi dan pelaporannya (Urbietta, 2024; Hambali, 2024). Berdasarkan temuan tersebut, implikasi kebijakan berikut disusun untuk memperkuat keterlibatan perusahaan dalam SDGs 14 secara lebih terarah.

Pertama, penting bagi pemerintah untuk memperkuat regulasi yang mewajibkan perusahaan, khususnya yang beroperasi di sektor dengan dampak tinggi terhadap laut untuk menyusun dan mengungkapkan strategi keberlanjutan yang spesifik pada perlindungan ekosistem laut. Hal ini menjadi relevan mengingat sektor-sektor tersebut secara langsung berkontribusi terhadap degradasi laut dan pesisir. Literatur menunjukkan bahwa sektor dengan risiko lingkungan tinggi, seperti energi, perkapalan, dan pariwisata pesisir, memiliki kontribusi signifikan terhadap pencemaran laut dan hilangnya keanekaragaman hayati, sehingga regulasi yang ketat sangat diperlukan untuk mendorong perubahan perilaku korporasi (Di Vaio *et al.*, 2024; Hambali & Adhariani, 2024).

Lemahnya pengawasan dan implementasi regulasi menjadi kendala utama dalam pencapaian SDG 14 di Indonesia. Hal ini sejalan dengan temuan studi lintas negara yang menegaskan bahwa kapasitas kelembagaan dan kualitas tata kelola lingkungan di tingkat nasional berperan penting dalam memastikan kepatuhan korporasi terhadap agenda keberlanjutan (Guillamón *et al.*, 2025). Oleh karena itu, otoritas seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan serta OJK dapat mengembangkan kerangka pelaporan terstandarisasi yang terintegrasi dengan sistem evaluasi nasional. Praktik pelaporan yang terstandarisasi terbukti dapat meningkatkan transparansi, mencegah praktik simbolik (*SDGs-washing*), dan memperkuat legitimasi korporasi dalam mendukung tujuan keberlanjutan (Awuah *et al.*, 2024; Erin & Olojede, 2024; Nicolo' *et al.*, 2024)

Kedua, hasil yang menunjukkan pengaruh positif skor ESG terhadap kepedulian perusahaan memperkuat urgensi pemberian insentif terhadap pelaku usaha yang memiliki kinerja ESG yang baik. Perusahaan dengan skor ESG yang tinggi cenderung

memiliki tata kelola yang lebih baik dan komitmen lebih kuat terhadap isu keberlanjutan, termasuk dalam aspek kelautan. Temuan ini konsisten dengan literatur yang menunjukkan bahwa kualitas kinerja ESG berhubungan erat dengan tingkat transparansi dan integrasi tujuan SDGs dalam strategi bisnis, sehingga mendorong perusahaan dengan performa lebih tinggi untuk lebih terbuka dalam pengungkapan dan keterlibatan keberlanjutan (Nicolo' *et al.*, 2024; Yang *et al.*, 2024). Penguatan mekanisme insentif berbasis ESG dapat menjadi alat kebijakan yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta. Studi lintas negara juga menegaskan bahwa regulasi berbasis insentif mendorong pergeseran perusahaan dari praktik simbolik menuju implementasi substantif, karena pasar dan investor merespons positif terhadap integrasi ESG yang kredibel (Galeazzo *et al.*, 2024; Guillamón *et al.*, 2025). Sejalan dengan itu, regulator dapat menautkan pemberian insentif pada kriteria yang terukur dan dapat diverifikasi, misalnya pemenuhan ambang batas skor ESG dan bukti program yang relevan dengan perlindungan ekosistem laut. Bentuk insentif dapat berupa insentif fiskal tertentu, kemudahan perizinan, atau preferensi pembiayaan bagi perusahaan yang menunjukkan kontribusi nyata terhadap keberlanjutan laut (Billedeau & Wilson, 2024; Perevoznic & Dragomir, 2024). Untuk menjaga akuntabilitas, manfaat insentif dapat diberikan secara bertahap berdasarkan capaian dan evaluasi periodik, serta diprioritaskan pada sektor berdampak tinggi agar selaras dengan sumber tekanan utama terhadap ekosistem laut. Praktik di berbagai negara menunjukkan bahwa ketika dukungan fiskal dikaitkan dengan agenda keberlanjutan, perusahaan terdorong mengalihkan investasi ke teknologi yang lebih bersih dan model bisnis yang lebih bertanggung jawab, sehingga komitmen terhadap SDGs, termasuk SDG 14, tercermin dalam tindakan nyata (Di Vaio *et al.*, 2024).

Ketiga, temuan negatif antara umur perusahaan dengan kepedulian terhadap SDG 14 dapat diinterpretasikan sebagai sinyal bahwa perusahaan yang lebih mapan cenderung memiliki pendekatan konservatif dan kurang adaptif terhadap agenda keberlanjutan baru (Leyva-de la Hiz & Bolívar-Ramos, 2022). Hal ini dapat disebabkan oleh budaya organisasi yang sudah mengakar serta kecenderungan mempertahankan proses dan strategi lama, sehingga menghambat adopsi inovasi dan respons terhadap isu lingkungan yang berkembang (Le Mens *et al.*, 2015). Dalam praktiknya, inersia organisasi kerap terlihat pada pola pengungkapan yang berorientasi kepatuhan minimum dan belum

menyentuh perubahan proses inti; penguatan tata kelola pelaporan dan penataan mekanisme internal menjadi titik awal untuk memecah hambatan tersebut (Awuah *et al.*, 2024; Urbietta, 2024). Kondisi ini menegaskan perlunya intervensi yang lebih terarah bagi perusahaan berusia lama, antara lain melalui program pelatihan dan pendampingan yang menitikberatkan pada integrasi SDGs 14 ke dalam tata kelola dan proses pelaporan perusahaan, penyusunan panduan pengungkapan yang lebih spesifik untuk isu kelautan dan pesisir, serta penguatan mekanisme evaluasi kepatuhan dan kualitas pengungkapan oleh otoritas pasar modal dan regulator terkait di Indonesia, sehingga perusahaan tidak berhenti pada kepatuhan minimum tetapi terdorong melakukan penyesuaian strategi dan proses internal secara bertahap.

Dengan mengacu pada hal-hal tersebut, kebijakan kelautan nasional perlu menekankan pendekatan kolaboratif yang melibatkan regulator, dunia usaha, dan masyarakat sipil, serta memanfaatkan instrumen-instrumen kebijakan seperti regulasi berbasis insentif, mekanisme pelaporan keberlanjutan yang diperkuat, serta strategi komunikasi yang lebih intensif kepada sektor-sektor kunci. Kolaborasi yang disertai konsistensi desain kebijakan mendorong pergeseran dari komitmen seremonial menuju implementasi yang terukur di tingkat perusahaan dan nasional (Erin & Olojede, 2024; Guillamón *et al.*, 2025; Perevoznic & Dragomir, 2024). Pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga menegaskan kontribusi utama penelitian ini sebagai dasar pemetaan bagi perumusan kebijakan SDGs 14 yang lebih tepat sasaran, melalui identifikasi karakteristik perusahaan dan sektor yang paling responsif maupun yang cenderung tertinggal, sehingga intervensi dapat dirancang berbasis sektor dan berorientasi pada peningkatan keterlibatan korporasi secara lebih merata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Thomson Reuters Database atas penyediaan data perusahaan yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Dining Nika Alina berkontribusi dalam perumusan konsep dan penulisan artikel penelitian. Ahmad Hambali bertanggung jawab atas penyusunan metodologi penelitian dan memberikan masukan terhadap kerangka penelitian. Pengumpulan data dan pengecekan naskah artikel dilakukan oleh

Umar Abdurrahman, Ismail Maqbul, Ernawati, dan Neng Tanty Sofyana. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui naskah akhir artikel ini

DAFTAR PUSTAKA

- Aptasari, F. W., Aryawati, N. P. A., & Falah, M. H. (2024). Identifikasi Greenwashing atau Greenwashing pada Perusahaan Retail di Indonesia: Evaluasi Laporan Keberlanjutan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 19(2), 301–322. <https://doi.org/10.47441/jkp.v19i2.397>.
- Arora, N. K., Mishra, I., & Arora, P. (2023). SDG 14: life below water- viable oceans necessary for a sustainable planet. *Environmental Sustainability*, 6(4), 433–439. <https://doi.org/10.1007/s42398-023-00299-0>.
- Awuah, B., Yazdifar, H., & Elbardan, H. (2024). Corporate reporting on the Sustainable Development Goals: a structured literature review and research agenda. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 20(4), 617–646. <https://doi.org/10.1108/JAOC-10-2022-0155>.
- Balasubramanian, S., Shukla, V., Islam, N., & Manghat, S. (2024). Construction Industry 4.0 and Sustainability: An Enabling Framework. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 71, 1–19. <https://doi.org/10.1109/TEM.2021.3110427>.
- Billedeau, D. B., & Wilson, J. (2024). Assessing the impact of the sustainable development goals on corporate philanthropy: A study of Canada's leading private sector companies. *Business Strategy and Development*, 7(1), e315. <https://doi.org/10.1002/bsd2.315>.
- Cameron, A. C., & Miller, D. L. (2015). A practitioner's guide to cluster-robust inference. *Journal of Human Resources*, 50(2), 317–372.
- Di Vaio, A., Dell'Amura, G., Chhabra, M., & Garofalo, A. (2024). Circular economy and waste production models for sustainable development goals 12 and 14: Evidence from cruise sustainability reporting. *Sustainable Development*, 32(6), 6686–6702. <https://doi.org/10.1002/sd.3051>.
- Erin, O. A., & Olojede, P. (2024). Do nonfinancial reporting practices matter in SDG disclosure? An exploratory study. *Meditari Accountancy Research*, 32(4), 1398–1422. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-06-2023-2054>.
- Galeazzo, A., Miandar, T., & Carraro, M. (2024). SDGs in corporate responsibility reporting: a longitudinal investigation of institutional determinants and financial performance. *Journal of Management and Governance*, 28(1), 113–136. <https://doi.org/10.1007/s10997-023-09671-y>.
- Guillamón, M. D., Ríos, A. M., & Benito, B. (2025). Understanding the Factors Influencing SDG Achievement Across Nations: A Comprehensive Study. *Sustainable Development*, 33(4), 5336–5350. <https://doi.org/10.1002/sd.3405>.

- Gutiérrez-Ponce, H., & Wibowo, S. A. (2023). Sustainability Reports and Disclosure of the Sustainable Development Goals (SDGs): Evidence from Indonesian Listed Companies. *Sustainability (Switzerland)*, *15*(24), 16919. <https://doi.org/10.3390/su152416919>.
- Hambali, A. (2024). Komitmen atas SDGs-9, tingkat inovasi, dan dampaknya pada kinerja keberlanjutan perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, *24*(1), 53–68. <https://doi.org/10.36452/akunukd.v24i1.3220>.
- Hambali, A., & Adhariani, D. (2024). Corporate biodiversity disclosure: The role of institutional factors and corporate governance. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, *31*(6), 5260–5274. <https://doi.org/10.1002/csr.2865>.
- Hosmer, D. W., & Lemeshow, S. (1980). Goodness of fit tests for the multiple logistic regression model. *Communications in Statistics - Theory and Methods*, *9*(10), 1043–1069. <https://doi.org/10.1080/03610928008827941>.
- Hosmer, D. W., Jr., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. X. (2013). *Applied logistic regression* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- Jubaedah, I., & Anas, P. (2019). Dampak Pariwisata Bahari Terhadap Ekosistem Terumbu Karang di Perairan Nusa Penida, Bali. *Jurnal Penyuluhan Perikanan Dan Kelautan*, *13*(1), 59–75. <https://doi.org/10.33378/jppik.v13i1.124>.
- Le Mens, G., Hannan, M. T., & Pólos, L. (2015). Age-related structural inertia: A distance-based approach. *Organization Science*, *26*(3), 756–773.
- Leyva-de la Hiz, D. I., & Bolívar-Ramos, M. T. (2022). The inverted U relationship between green innovative activities and firms' market-based performance: The impact of firm age. *Technovation*, *110*, 102372. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2021.102372>.
- Lodhia, S., Kaur, A., & Kuruppu, S. C. (2023). The disclosure of sustainable development goals (SDGs) by the top 50 Australian companies: substantive or symbolic legitimation? *Meditari Accountancy Research*, *31*(6), 1578–1605. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-05-2021-1297>.
- Marwa, T., Muizzuddin, Bashir, A., Andaiyani, S., & Cahyadi, A. (2024). Determinants of the Blue Economy Growth in the Era of Sustainability: A Case Study of Indonesia. *Economies*, *12*(11), 299. <https://doi.org/10.3390/economies12110299>.
- Martín-Blanco, C., Zamorano, M., Lizárraga, C., & Molina-Moreno, V. (2022). The Impact of COVID-19 on the Sustainable Development Goals: Achievements and Expectations. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *19*(23), 16266. <https://doi.org/10.3390/ijerph192316266>.
- Menard, S. (2002). *Applied Logistic Regression Analysis*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781412983433>.
- Nicolo', G., Zampone, G., De Iorio, S., & Sannino, G. (2024). Does SDG disclosure reflect corporate underlying sustainability performance? Evidence from UN Global Compact participants. *Journal of International Financial Management & Accounting*, *35*(1), 214–260. <https://doi.org/10.1111/jifm.12194>.
- Nicolò, G., Zanellato, G., Tiron-Tudor, A., & Tartaglia Polcini, P. (2023). Revealing the corporate contribution to sustainable development goals through integrated reporting: a worldwide perspective. *Social Responsibility Journal*, *19*(5), 829–857. <https://doi.org/10.1108/SRJ-09-2021-0373>.
- O'Brien, R. M. (2007). A caution regarding rules of thumb for variance inflation factors. *Quality & Quantity*, *41*(5), 673–690. <https://doi.org/10.1007/s11135-006-9018-6>.
- Ocean Health Index. (2024). *Global scenarios data for Ocean Health Index*. <https://oceanhealthindex.org/global-scores/data-download/>.
- PBB. (2015). *Sustainable Development Goals*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/>.
- Perevoznic, F. M., & Dragomir, V. D. (2024). Achieving the 2030 Agenda: Mapping the Landscape of Corporate Sustainability Goals and Policies in the European Union. *Sustainability*, *16*(7), 2971. <https://doi.org/10.3390/su16072971>.
- Riesnandar, E., & Nuhartonosuro, I. M. (2025). Manajemen Sumber Daya Kelautan dalam Implementasi Blue Economy: Peluang dan Tantangan di Indonesia. *JIIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *8*(4), 3645–3652.
- Soemarmi, A., & Diamantina, A. (2019). Konsep negara kepulauan dalam upaya perlindungan wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, *48*(3), 241–248. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.241-248>.
- Taskin, S., Javed, A., & Kohda, Y. (2024). Achieving the Sustainable Development Goals Through Corporate Sustainability in a Private Banking Organization. *International Journal of Asian Business and Information Management*, *15*(1), 1–15. <https://doi.org/10.4018/IJABIM.335096>.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. https://www.un.org/ohrlls/sites/www.un.org.ohrlls/files/2030_agenda_for_sustainable_development_web.pdf.
- Urbietá, L. (2024). Firms' engagement with sustainable development goals (SDGs): A scoping review of empirical works. *Business Strategy and Development*, *7*(3), e416. <https://doi.org/10.1002/bsd2.416>.
- Wiryanto, W., Rifqi, M. I., & Afif, M. M. (2025). Innovation and policies in water resource management to achieve the *Life Below Water* goal in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *1462*(1),

12063. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1462/1/012063>

- Yang, X., Chen, Z. H. J., Feng, Y., Gao, X., & Koedijk, K. G. (2024). Corporate SDG performance and investor trading behavior. *Finance Research Letters*, 66, 105659. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105659>.
- Zulaika, S., Harsono, I., Mahmudin, T., Yahya, A. S., & Sutanto, H. (2024). Pengaruh Kebijakan Pemerintah dan Kemitraan Bisnis dalam Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan terhadap Kesejahteraan Nelayan dan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(01), 41–55. <https://doi.org/10.58812/jmws.v3i01.944>.
- Zulbainarni, N., Indrawan, D., & Khumaera, N. I. (2020). Does Indonesia's fisheries governance ready to achieve SDG's 14? the role of multi-stakeholder in fisheries policy. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 420(1), 12035. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/420/1/012035>.